



30 Tahun, Pemprov

Dapat Miliaran

Di ITDC untuk Hotel dan Lapangan Golf

DENPASAR - Kabar penyusutan tanah milik Pemprov Bali di areal ITDC, Nusa Dua, dari 52 hektare menjadi 39 hektare, disangkal Badan Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Bali. Kepala Badan Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Bali, IB Arda menyatakan aset tanah Pemprov di ITDC masih tetap utuh sejak tahun 1989. Yang menarik, kerja sama aset Pemprov dengan ITDC berlangsung dalam kurun waktu 30 tahun. Kerja sama diperbarui Desember tahun 2002 dan bakal berakhir tahun 2032 mendatang. Arda didampingi Kepala UPT Pemanfaatan dan Pengamanan Aset, Ketut Nayaka, menyebut sejak awal kerjasama dengan ITDC aset Pemprov tidak pernah berubah. Tanah seluas 39,9 hektare itu tersebar di beberapa titik di ITDC. Salah satu lahan milik Pemprov berfungsi untuk lapangan golf.

Selain itu juga digunakan taman dan sebagian bangunan hotel St. Regis, tempat Raja Salman Bin Abdul Azis Al-Saud menginap. Di hotel St. Regis lahan Pemprov

yang digunakan seluas 2 hektare. "Selama ini pemanfaatan aset di ITDC menggunakan sertifikat HPL (Hak Pengelolaan). Tidak ada sewa aset, adanya pengelolaan kerja sama. Tanah itu masih tetap milik Pemprov Bali," jelas Arda kemarin (20/3).

Menurut Arda, aset Pemprov yang dikerjasamakan dengan ITDC menjadi penyumbang pemasukan pendapatan asli daerah (PAD). Setiap tahun miliaran rupiah masuk ke kas daerah dari bagi hasil. Tahun 2016 lalu, Pemprov mendapat setoran Rp 8 miliar lebih. Hasil tersebut didapat dari persentase pembagian hasil 41,16 persen untuk Pemprov, serta 58,84 persen untuk ITDC. "Semua uang masuk ke kas umum daerah melalui surat setoran. Uang masuk tanpa melalui perantara," tukasnya.

Disinggung pernyataan Ketua Komisi I DPRD Bali, Ketut Tama Tenaya yang menduga ada penyusutan lahan hingga 13 hektare, Arda dan Nayaka mempunyai jawaban lain. Menurut Nayaka, bisa saja luas lahan masih berdasar perkiraan. Bukan berdasar hasil pengukuran sebenarnya. Pengalamannya selama men-



Selama ini pemanfaatan aset di ITDC menggunakan sertifikat HPL (Hak Pengelolaan). Tidak ada sewa aset, adanya pengelolaan kerja sama. Tanah itu masih tetap milik Pemprov Bali,”

IB Arda, Kepala Badan Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Bali

gukur aset di lapangan, Nayaka mengaku kerap mendapat hasil tidak sesuai antara estimasi dengan hasil pengukuran.

Yang jelas, lanjut Arda, potensi pendapatan Pemprov bakal bertambah seiring dibangunnya Hotel Shangrila. Dijelaskan peletakan batu pertama pembangunan Hotel Shangrila sudah

dilakukan beberapa waktu lalu. Namun, kini hotel berbintang tersebut belum jadi. Selain hotel, rencananya juga akan dibangun kondominium di dalam ITDC.

“Semua bangunan dan hotel di ITDC memberikan masukan minimum dan maksimum pada Pemprov. Kami inginnya investasi cepat masuk, sehingga bisa menambah pemasukan daerah,” papar Arda. Terkait rencana pembentukan pansus aset oleh dewan, Arda mengaku menyambut baik. Menurutnya pansus dewan akan sangat membantu pengamanan dan pemanfaatan aset.

Sementara itu, Tama Tenaya bersikukuh bahwa dirinya mendapat informasi luas lahan milik Pemprov di ITDC seluas 52 hektare cukup valid. Informasi tersebut didapat dari internal ITDC. Sayang, informan tersebut sudah meninggal dunia. Kendati demikian, Tenaya yakin jika aset Pemprov

di ITDC harus diselamatkan dengan cara diusut tuntas.

Ditambahkan, rencana pembentukan pansus aset untuk mendapatkan data terbaru. Dewan tidak ingin aset Pemprov hilang karena disertifikatkan pihak lain. “Semua aset sertifikatnya harus jelas. Kalau sertifikatnya atas nama orang lain, bisa kalah jika ada masalah hukum,” ungkap Tenaya.

Tidak hanya aset, bentuk kontrak kerja sama hotel juga perlu diusut. Selama ini dewan tidak pernah mengetahui jalinan kerja sama pihak hotel dengan eksekutif. Pasalnya, ada informasi setoran pihak hotel ke ITDC yang kemudian diteruskan ke Pemprov menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah ada temuan, baru pihak hotel membayar langsung ke Pemprov. “Nah, masalah pembayaran ini juga kami ingin tahu data dan faktanya,” tukas politisi PDIP itu. (san/dot)

Edisi : Selasa, 21 Maret 2017

Hal : 27



BOS Belum Cair, Sekolah Ngutang

SEKOLAH Dasar (SD) di Jembrana harus bersabar menunggu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) cair. Sebab, hingga kini dana yang digunakan untuk berbagai keperluan belajar-mengajar belum cair.

Lantaran dana BOS yang cair tiga bulan sekali belum cair maka sangat mengganggu operasional sekolah. Seperti kegiatan jeda di sekolah dasar, tes ulangan tengah semester (UTS), bahkan untuk perlengkapan alat tulis kantor (ATK) termasuk juga gaji guru-guru-honorar belum dibayar. Dengan kondisi ini, beberapa guru mengaku sangat prihatin "Agar bisa proses belajar mengajar berjalan harus ngutang dulu untuk sejumlah keperluan seperti beli kapur, kertas serta keperluan yang mendesak. Kami sangat prihatin dengan kondisi ini," ujar seorang guru.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Jembrana I Putu Eka Suarnawa ketika dikonfirmasi Senin (20/3) membenarkan dana BOS tersebut belum cair. Pihaknya mengaku sudah mempertanyakan ke Manajer BOS di Provinsi. "Kemungkinan dua atau tiga hari lagi cair. Jangan sampai hanya karena keterlambatan dana BOS meninggalkan tugas," tukas dia. (nom/gup)

Edisi : Selasa, 21 Maret 2017

Hal : _____



Tiga Bulan, Honor Tak Dibayar

Tenaga Kontrak di SMA/SMK di Jembrana

NEGARA - Pasca Sekolah Menengah Atas (SMA) di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Bali. Justru menimbulkan persoalan baru. Semua tenaga kontrak di SMA dan SMK seluruh Jembrana, sudah tiga bulan ini tidak menerima honor. Sehingga banyak tenaga kontrak yang bekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Seperti yang dialami sejumlah tenaga kontrak di SMA 1 Negara, mulai dari guru, tenaga kebersihan dan satpam sudah tiga bulan ini mereka tidak menerima hak honor bulanan. "Tidak *tau*? Sampai kapan honor tidak dibayar," kata salah satu tenaga kontrak di SMA Jembrana yang wanti-wanti namanya tak dikorbankan.

Karena honor tidak kunjung diterima, tidak sedikit tenaga kontrak



Tidak hanya di sini (SMA 1 Negara), semua sekolah (SMA/SMK) di seluruh Bali honor belum dibayar."

PUTU PRAPTA ARYA
Kasek SMAN 1 Negara

yang *nyambi* bekerja untuk kebutuhan rumah tangga. Apalagi sudah mendekati hari raya, "Kalau tidak *nyambi*, keluarga mau makan apa," keluh tenaga kontrak yang enggan namanya dikorbankan ini.

Kondisi ini dibenarkan Kepala Sekolah SMAN 1 Negara Putu Prapta Arya. Menurutnya, honor tenaga kontrak sudah tiga bulan ini tidak terbayar. Terhitung sejak SMA dan SMK menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali. "Tidak hanya di sini (SMAN 1 Negara), semua sekolah (SMA/SMK) di seluruh Bali honor belum dibayar," jelasnya, Senin (20/3).

Menurutnya, saat ini ada 30 orang tenaga kontrak di SMAN 1 Negara terdiri dari guru, tenaga kebersi-

han dan keamanan sekolah. Honor tenaga kontrak sesuai dengan UMR Bali, untuk Jembrana saat ini berlaku UMK Rp 2.006.618. Jadi, tunggakan honor SMAN 1 Negara untuk seluruh tenaga kontrak sebesar Rp 100 juta lebih. "Kami masih menunggu," ujarnya.

Pihaknya tidak tahu pasti penyebab penundaan honor kontrak ini. Pihaknya hanya bisa menunggu keputusan Pemerintah Provinsi Bali pembayaran honor tenaga kontrak ini. Selain honor yang tidak dibayar selama tiga bulan, setelah peralihan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten menjadi kewenangan provinsi, tunjangan guru juga dipotong dari awalnya Rp 3 juta sekarang menjadi Rp 800 ribu. (bas/gup)

Edisi : Selasa, 21 Maret 2017

Hal : 32